



## DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Keuangan, 1993/1994-2002 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan” Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Bagian Keuangan, 1993/1994-2002. “Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan” Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Bagian Keuangan, 1993/1994-2002. “Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan” Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- Boedijoewono, Noegroho. 1987. *“Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis”* UPP AMP YKPN, Yogyakarta., hal 287,
- Departemen Keuangan , 2003 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara” Jakarta.
- Depdagri, 2002 ”Keputusan Mendteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999 “Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1981 “Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tahun 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, Direktorat Keuangan dan peralatan Daerah dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah” Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1994. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/606/PUOD tanggal 9 Pebruari 1985 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Inspektorat Jenderal Depdagri, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985 tentang Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengurusan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1985, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 tentang Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan Masri Maris), UI-Press, Jakarta.

Dwyer, JR. dan Hafer R.W. 1998 "*The Federal Government's Budget Surplus: Cause for celebration?*" Federal reserve bank of Atlanta, *Economic Review*, Third Quarter, .42-51

Halim, Abdul. 2001. "Analisis deskriptrip pengaruh fiscal stress pada APBD Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tahun 1995/1996 – 1998/1999" *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Sistem Unformasi STIE "YO"* Yogyakarta, no. 2 Mei 001, 127-146

Jasagung, Hariadi. 1999. "Evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 1991/1992 –2000" *Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta* (tidak dipublikasikan)

Januarti, 1999, "Peranan Subsidi Daerah Otonom (SDO) Terhadap Pembiayaan Rutin di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas ", *Tesis S-2, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*, (tidak dipublikasikan).

Kuncoro, Mudrajad, 2001. "*Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*" UPP YKPN, Yogyakarta

Mamesah, D.J, 1995." *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*" P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mardiasmo, 2001 "Budgetary Slack resulted from the effect of local Government financial dependencyon Central and provincial government in Planning and Preparing Local Government Budget" *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* , vol VII, Februari, 55 - 62



Menteri Negara Otonomi Daerah dan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2000, *Pembekalan Teknis Manajemen Strategik Dan Teknik Penganggaran/Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda*, PAU-SE UGM, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 104 tahun 2000 “tentang Dana Perimbangan” Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 tahun 2000 “tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” Jakarta.

Sobel, Russell. 2001 “The Budget Surplus: A Public Choice Explanation” File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML. *The Political Economy of the Budget Surplus in the United States*, *Journal of Economic Perspectives* 14, No. 3 , 1-24

Suralaga, Gde, 2001, “Peranan Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem”, *Tesis S-2*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).